LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

PERIODE JANUARI TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Pelaksanaan Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2024 dilaksanakan sesuai rencana kerja dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah

Permenpan Nomor 10 Tahun 2019 merupakan acuan bagi Pengadilan Negeri Sarolangun dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM untuk mencapai sasaran target penyelesaian dokumen pada 6 (enam) Komponen Pengungkit yangmenjadi faktor penentu pencapaian sasaran hasil pembangunan Zona Integritas tersebut, untuk itu Pengadilan Negeri Sarolangun telah memiliki rencana kerja dalam melaksanakan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM Tahun 2024. Rencana kerjatersebut telah disusun sebagai pedoman kerja bagi tim kerja agar rencana aksi yangdituangkan dalam rencana dapat berjalan sesuai jadwal, target-target dan tahapan-tahapan serta dapat ditindaklanjuti sebagaimana telah ditetapkan dalam monitoringdan evaluasi pelaksanaan Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM.

II. Dasar

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.
2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 194/KMA/SK/X/2014 Tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas.
3. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Tentang Pembentukan

Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi BersihDan Melayani (WBBM) Pada Pengadilan Negeri Sarolangun Kelas II.

III. Tujuan

1. Memastikan rencana aksi berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.
2. Mengkoordinir percepatan implementasi progres pelaksanaan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM sesuai target rencana kerja.
3. Memastikan hambatan atas pelaksanaan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM telah diselesaikan oleh masing-masing Koordinator Komponen Pengungkit.
4. Memastikan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti oleh masing-masing Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Pengadilan Negeri Sarolangun.

IV. Ruang Lingkup

Kegiatan monitoring dan evaluasi meliputi ruang lingkup sebagai berikut:

A. Monitoring

Ruang lingkup kegiatan pemantauan kemajuan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2024 adalah rencana aksi dan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Pengadilan Negeri Sarolangun.

B. Evaluasi

Ruang lingkup kegiatan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Pengadilan Negeri Sarolangun pada 6 Komponen Pengungkit yaitu :

1. Manajemen Perubahan
2. Penataan Tata Laksana
3. Penataan Sistem Manajemen SDM
4. Penguatan Akuntabilitas
5. Penguatan Pengawasan
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

BAB II

MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

A. MONITORING

Perkembangan dan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Sarolangun dapat dirangkum sebagai berikut :

1. Area Manajemen Perubahan

   Progres target dan realisasi komponen pengungkit manajemen perubahan periode Januari 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Rencana Kegiatan	Pelaksanaan		Keterangan
		Sudah	Belum	
1	Membentuk Tim Pembentuk Tim Kerja Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM Tahun 2024.	√		Tim Pembentuk Tim Kerja telah dibuat.
2	Membentuk Tim Kerja Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM Tahun 2024.	√		Tim Kerja Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM telah dibentuk melalui prosedur/mekanisme yang jelas.
3	Menyusun Rencana Kerja Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM Tahun 2024.	√		Rencana Kerja Pembangunan ZI menuju WBK / WBBM Tahun 2024 telah tersusun dalam diterbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor W5-U9/ Kp.04.4/7/2024.
4	Melakukan Sosialisasi tentang Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM kepada seluruh pegawaiPN Sarolangun.	√		Sosialisasi tentang Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM kepada seluruh pegawai PN Sarolangun sudah dilaksanakan.

5	Menyelenggarakan rapat Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Area 1 Manajemen Perubahan Bulan Januari 2025	√		Rapat Pembangunan ZI pada Area 1 sudah dilaksanakan.
6	Laporan Rencana Kerja Area 1 Manajemen Perubahan Bulan September 2024	√		Laporan Rencana Kerja Area 1 Manajemen Perubahan telah Dikerjakan
7	Laporan Rencana Kerja Area 2 Penataan Tata Laksana Bulan Januari 2025	√		Area 2 Penataan Tata Laksana telah menyerahkan laporan rencana kerja bulan Januari 2025
8	Laporan Rencana Kerja Area 3 Penataan Sistem Manajemen SDM Bulan Januari 2025	√		Area 3 Penataan Sistem Manajemen SDM telah menyerahkan laporan rencana kerja bulan Januari 2025
9	Laporan Rencana Kerja Area 4 Penguatan Akuntabilitas Bulan Januari 2025	√		Area 4 Penguatan Akuntabilitas telah menyerahkan laporan rencana kerja bulan Januari 2025
10	Laporan Rencana Kerja Area 5 Penguatan Pengawasan Bulan Januari 2025	√		Area 5 Penguatan Pengawasan telah menyerahkan laporan rencana kerja bulan Januari 2025
11	Laporan Rencana Kerja Area 6 Peningkatan	√		Area 6 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik telah

	Kualitas Pelayanan Publik Bulan Januari 2025			menyerahkan laporan rencana kerja bulan Januari 2025
12	Membangun budaya kerja dan pola pikir di PN Sarolangun melalui:			
	- Penetapan Role Model	√		Role Model telah Ditetapkan
	- Penetapan Agen Perubahan	√		Agen Perubahan telah ditetapkan.
	- Penunjukan Tim Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	√		Tim Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) telah dibentuk dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun
	- Sosialisasi Perma Nomor 7, 8 dan 9 Tahun 2016 serta Maklumat Ketua Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 01/Maklumat/ KMA/IX/2017	√		Sudah rutin dilaksanakansetiap rapat bulanan.
	- Sosialisasi 5 R dan 3S	√		Sudah rutin dilaksanakan setiap rapat bulanan.
	- Apel Pagi dan Sore	√		Sudah rutin dilaksanakan setiap Senin pagi dilanjutkan dengan pembinaan oleh Ketua Pengadilan, dan sebelum apel Jum'at sore dilanjutkan dengan pembinaan oleh Ketua Pengadilan.
	- Rapat Berjenjang dan Rapat Bulanan.	√		Sudah dilaksanakan setiap bulan

	- Penandatanganan Pakta Integritas dan Komitmen Bersama.	√		Penandatangan Pakta Integritas dan Komitmen Bersama sudah dilaksanakan oleh seluruh Pegawai PN Sarolangun
14	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Area 1 Manajemen Perubahan	√		Monev dilaporkan setiap bulan sejak Januari 2025.
15	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Area 2 Penataan Tata Laksana	√		Monev dilaporkan setiap bulan sejak Januari 2025.
16	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Area 3 Penataan Sistem Manajemen SDM	√		Monev dilaporkan setiap bulan sejak Januari 2025.
17	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Area 4 Penguatan Akuntabilitas	√		Monev dilaporkan setiap bulan sejak Januari 2025.
18	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Area 5 Penguatan Pengawasan	√		Monev dilaporkan setiap bulan sejak Januari 2025.
19	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Area 6 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	√		Monev dilaporkan setiap bulan sejak Januari 2025.

2. Penataan Tata Laksana

Progres target dan realisasi komponen pengungkit Penataan Tata Laksana periode Januari 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Rencana Kegiatan	Pelaksanaan		Keterangan
		Sudah	Belum	
1.	Rapat kordinasi area	√		Sudah dilaksanakan untuk membahas rencana kerja
2.	Peneribitan SK terkait SOP	√		Sudah memperoleh salinan SK dari kepegawaian
3.	Mengupdate dokumentasi aplikasi layanan	√		Sudah mendokumentasikan aplikasi-aplikasi terbaru
4.	Melakukan pengembangan aplikasi layanan publik	√		Telah mengembangkan aplikasi layanan publik.
5	Monev aplikasi layanan publik		√	Rencana akan dilaksanakan bulan depan
6	Monev keterbukaan informasi publik		√	Rencana akan dilaksanakan bulan depan
7	Memaksimalkan web site dan media sosial untuk keterbukaan informasi Publik	√		Sudah memuat berbagai informasi dan berita kedalam website dan media sosial

3. Penataan Sistem Manajemen SDM

Progres target dan realisasi komponen pengungkit Penataan Manajemen SDM periode Januari 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Rencana Kegiatan	Pelaksanaan		Keterangan
		Sudah	Belum	
1.	Rapat tim Area III mengenai rencana kerja Tim	√		Sudah dilaksanakan
2.	Perumusan materi dan file-file yang terbaru Area III	√		Sudah dilaksanakan

3.	Pengumpulan SK-SK Ketua terbaru	√		Sudah dilaksanakan
4.	Penyusunan eviden-eviden yang terbaru	√		Sudah dilaksanakan
5.	Pembahasan kecocokan eviden dengan topik Area III	√		Sudah dilaksanakan
6.	Monitoring dan evaluasi Area III	√		Sudah dilaksanakan
7.	Tahap penyusunan hasil pengumpulan eviden kekotak berkas atau box odner Area III	√		Sudah dilaksanakan
8.	Laporan ke QMR tentang hasil kerja Area III		√	Dalam proses penyusunan
9	Evaluasi terhadap jadwal rencana kerja	√		Sudah dilaksanakan
10	Laporan dan penyerahan evaluasi jadwal rencana kerja ke QMR		√	Dalam proses penyusunan

4. Penguatan Akuntabilitas

Progres target dan realisasi komponen pengungkit Penguatan Akuntabilitas periode Januari 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Rencana Kegiatan	Pelaksanaan		Keterangan
		Sudah	Belum	
1	Membentuk Tim Pembentuk Tim Kerja Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM Tahun 2025	√		Sudah dilaksanakan
2	Rapat setiap personel mengenai pembagian tugas masing-masing	√		Sudah dilaksanakan
3	Penelusuran SK KPN Terbaru tentang ZI	√		Sudah dilaksanakan
4	Penyusunan eviden LkjIP, Renstra, IKU, Reviu IKU, RKT, PKT, LRA	√		Sudah dilaksanakan
5	Penyusunan evidence penguatan akuntabilitas	√		Sudah dilaksanakan
6	Rapat personel tentang pencocokkan evidence area IV apakah telah sesuai	√		Sudah dilaksanakan
7	Monitoring dan evaluasi tiap evidence yang dikumpulkan	√		Sudah dilaksanakan
8	Laporan ke Koordinator Area IV mengenai evidence yang dikumpulkan	√		Sudah dilaksanakan

5. Penguatan Pengawasan

Progres target dan realisasi komponen pengungkit Penguatan Pengawasan periode Januari 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Rencana Kegiatan	Pelaksanaan		Keterangan
		Sudah	Belum	
1.	Rapat Area V	√		Sudah dilaksanakan
2	Kampanye publik	√		Sudah dilaksanakan
3	Melakukan pemasangan banner-banner dan media informasi	√		Sudah dilaksanakan sebagian
4	Melakukan pengumuman melalui audio tentang larangan gratifikasi setiap Hari	√		Sudah dilaksanakan
5	Melakukan pengumuman anti gratifikasi yang dibacakan oleh Majelis Hakim sebelum sidang	√		Sudah dilaksanakan
6	Melakukan pengawasan bidang oleh Hakim		√	Belum semua Hakim menyerahkan pengawasan bidang
7	Mengumpulkan Laporan Harta Kekayaan	√		Sudah dilaksanakan

	Penyelenggara Negara (LHKPN)			
8	Melakukan monev terhadap pengaduan masyarakat	√		Sudah dilaksanakan
9	Melakukan monev terhadap *Wistle Blowing System*	√		Sudah dilaksanakan
10	Melakukan monev terhadap benturan kepentingan	√		Sudah dilaksanakan

6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Progres target dan realisasi komponen pengungkit Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik periode Januari 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Rencana Kegiatan	Pelaksanaan		Keterangan
		Sudah	Belum	
1	Membentuk Tim Pembentuk Tim Kerja Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM Tahun 2025	√		Sudah dilaksanakan
2	Rapat setiap personel mengenai pembagian tugas masing-masing	√		Sudah dilaksanakan
3	Penelusuran SK KPN Terbaru tentang ZI	√		Sudah dilaksanakan
4	Penyusunan eviden LkjIP, Renstra, IKU, Reviu IKU, RKT, PKT, LRA	√		Sudah dilaksanakan
5	Penyusunan evidence penguatan akuntabilitas	√		Sudah dilaksanakan
6	Rapat personel tentang pencocokkan evidence area IV apakah telah sesuai	√		Sudah dilaksanakan
7	Monitoring dan evaluasi tiap evidence yang dikumpulkan	√		Sudah dilaksanakan
8	Laporan ke Koordinator Area IV mengenai evidence yang dikumpulkan	√		Sudah dilaksanakan

B. EVALUASI

1. Pengadilan Negeri Sarolangun telah melaksanakan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.
2. Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas telah sesuai dengan rencana kerja.

C. REKOMENDASI

1. Penyusunan LKE mencakup pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas bulan Januari 2025 untuk selanjutnya dapat digunakan sebagai acuan untuk laporan monitoring dan evaluasi bulan Februari 2025.
2. Agar pelaksanaan kegiatan rencana kerja di semua area Zona Integritas dapat dipertahankan dan lebih ditingkatkan sesuai dengan rencana kerja masing-masing area.

Demikian Laporan hasil tindak lanjut pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Pengadilan Negeri Sarolangun yang dilaporkan pada bulan Januari 2025. Semoga laporan ini dapat bermanfaat dalam penyelenggaraan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Pengadilan Negeri Sarolangun.

Koordinator Area I
Manajemen Perubahan

Reindra Jasper H Sinaga, S.H

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

PERIODE FEBRUARI TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Pelaksanaan Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2024 dilaksanakan sesuai rencana kerja dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah

Permenpan Nomor 10 Tahun 2019 merupakan acuan bagi Pengadilan Negeri Sarolangun dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM untuk mencapai sasaran target penyelesaian dokumen pada 6 (enam) Komponen Pengungkit yangmenjadi faktor penentu pencapaian sasaran hasil pembangunan Zona Integritas tersebut, untuk itu Pengadilan Negeri Sarolangun telah memiliki rencana kerja dalam melaksanakan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM Tahun 2024. Rencana kerjatersebut telah disusun sebagai pedoman kerja bagi tim kerja agar rencana aksi yangdituangkan dalam rencana dapat berjalan sesuai jadwal, target-target dan tahapan-tahapan serta dapat ditindaklanjuti sebagaimana telah ditetapkan dalam monitoringdan evaluasi pelaksanaan Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM.

II. Dasar

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.
2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 194/KMA/SK/X/2014 Tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas.
3. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Tentang Pembentukan

Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi BersihDan Melayani (WBBM) Pada Pengadilan Negeri Sarolangun Kelas II.

III. Tujuan

1. Memastikan rencana aksi berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.
2. Mengkoordinir percepatan implementasi progres pelaksanaan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM sesuai target rencana kerja.
3. Memastikan hambatan atas pelaksanaan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM telah diselesaikan oleh masing-masing Koordinator Komponen Pengungkit.
4. Memastikan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti oleh masing-masing Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Pengadilan Negeri Sarolangun.

IV. Ruang Lingkup

Kegiatan monitoring dan evaluasi meliputi ruang lingkup sebagai berikut:

A. Monitoring

Ruang lingkup kegiatan pemantauan kemajuan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2024 adalah rencana aksi dan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Pengadilan Negeri Sarolangun.

B. Evaluasi

Ruang lingkup kegiatan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Pengadilan Negeri Sarolangun pada 6 Komponen Pengungkit yaitu :

1. Manajemen Perubahan
2. Penataan Tata Laksana
3. Penataan Sistem Manajemen SDM
4. Penguatan Akuntabilitas
5. Penguatan Pengawasan
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

BAB II

MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

A. MONITORING

Perkembangan dan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Sarolangun dapat dirangkum sebagai berikut :

1. Area Manajemen Perubahan

   Progres target dan realisasi komponen pengungkit manajemen perubahan periode Februari 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Rencana Kegiatan	Pelaksanaan		Keterangan
		Sudah	Belum	
1	Membentuk Tim Pembentuk Tim Kerja Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM Tahun 2024.	√		Tim Pembentuk Tim Kerja telah dibuat.
2	Membentuk Tim Kerja Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM Tahun 2024.	√		Tim Kerja Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM telah dibentuk melalui prosedur/mekanisme yang jelas.
3	Menyusun Rencana Kerja Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM Tahun 2024.	√		Rencana Kerja Pembangunan ZI menuju WBK / WBBM Tahun 2024 telah tersusun dalam diterbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor W5-U9/ Kp.04.4/7/2024.
4	Melakukan Sosialisasi tentang Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM kepada seluruh pegawaiPN Sarolangun.	√		Sosialisasi tentang Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM kepada seluruh pegawai PN Sarolangun sudah dilaksanakan.

5	Menyelenggarakan rapat Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Area 1 Manajemen Perubahan Bulan Februari 2025	√		Rapat Pembangunan ZI pada Area 1 sudah dilaksanakan.
6	Laporan Rencana Kerja Area 1 Manajemen Perubahan Bulan September 2024	√		Laporan Rencana Kerja Area 1 Manajemen Perubahan telah Dikerjakan
7	Laporan Rencana Kerja Area 2 Penataan Tata Laksana Bulan Februari 2025	√		Area 2 Penataan Tata Laksana telah menyerahkan laporan rencana kerja bulan Februari 2025
8	Laporan Rencana Kerja Area 3 Penataan Sistem Manajemen SDM Bulan Februari 2025	√		Area 3 Penataan Sistem Manajemen SDM telah menyerahkan laporan rencana kerja bulan Februari 2025
9	Laporan Rencana Kerja Area 4 Penguatan Akuntabilitas Bulan Februari 2025	√		Area 4 Penguatan Akuntabilitas telah menyerahkan laporan rencana kerja bulan Februari 2025
10	Laporan Rencana Kerja Area 5 Penguatan Pengawasan Bulan Februari 2025	√		Area 5 Penguatan Pengawasan telah menyerahkan laporan rencana kerja bulan Februari 2025
11	Laporan Rencana Kerja Area 6 Peningkatan	√		Area 6 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik telah

	Kualitas Pelayanan Publik Bulan Februari 2025			menyerahkan laporan rencana kerja bulan Februari 2025
12	Membangun budaya kerja dan pola pikir di PN Sarolangun melalui:			
	- Penetapan Role Model	√		Role Model telah Ditetapkan
	- Penetapan Agen Perubahan	√		Agen Perubahan telah ditetapkan.
	- Penunjukan Tim Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	√		Tim Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) telah dibentuk dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun
	- Sosialisasi Perma Nomor 7, 8 dan 9 Tahun 2016 serta Maklumat Ketua Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 01/Maklumat/ KMA/IX/2017	√		Sudah rutin dilaksanakansetiap rapat bulanan.
	- Sosialisasi 5 R dan 3S	√		Sudah rutin dilaksanakan setiap rapat bulanan.
	- Apel Pagi dan Sore	√		Sudah rutin dilaksanakan setiap Senin pagi dilanjutkan dengan pembinaan oleh Ketua Pengadilan, dan sebelum apel Jum'at sore dilanjutkan dengan pembinaan oleh Ketua Pengadilan.
	- Rapat Berjenjang dan Rapat Bulanan.	√		Sudah dilaksanakan setiap bulan

	- Penandatanganan Pakta Integritas dan Komitmen Bersama.	√		Penandatangan Pakta Integritas dan Komitmen Bersama sudah dilaksanakan oleh seluruh Pegawai PN Sarolangun
14	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Area 1 Manajemen Perubahan	√		Monev dilaporkan setiap bulan sejak Februari 2025.
15	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Area 2 Penataan Tata Laksana	√		Monev dilaporkan setiap bulan sejak Februari 2025.
16	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Area 3 Penataan Sistem Manajemen SDM	√		Monev dilaporkan setiap bulan sejak Februari 2025.
17	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Area 4 Penguatan Akuntabilitas	√		Monev dilaporkan setiap bulan sejak Februari 2025.
18	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Area 5 Penguatan Pengawasan	√		Monev dilaporkan setiap bulan sejak Februari 2025.
19	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Area 6 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	√		Monev dilaporkan setiap bulan sejak Februari 2025.

2. Penataan Tata Laksana

Progres target dan realisasi komponen pengungkit Penataan Tata Laksana periode Februari 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Rencana Kegiatan	Pelaksanaan		Keterangan
		Sudah	Belum	
1.	Rapat kordinasi area	√		Sudah dilaksanakan untuk membahas rencana kerja
2.	Peneribitan SK terkait SOP	√		Sudah memperoleh salinan SK dari kepegawaian
3.	Mengupdate dokumentasi aplikasi layanan	√		Sudah mendokumentasikan aplikasi-aplikasi terbaru
4.	Melakukan pengembangan aplikasi layanan publik	√		Telah mengembangkan aplikasi layanan publik.
5	Monev aplikasi layanan publik		√	Rencana akan dilaksanakan bulan depan
6	Monev keterbukaan informasi publik		√	Rencana akan dilaksanakan bulan depan
7	Memaksimalkan web site dan media sosial untuk keterbukaan informasi Publik	√		Sudah memuat berbagai informasi dan berita kedalam website dan media sosial

3. Penataan Sistem Manajemen SDM

Progres target dan realisasi komponen pengungkit Penataan Manajemen SDM periode Februari 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Rencana Kegiatan	Pelaksanaan		Keterangan
		Sudah	Belum	
1.	Rapat tim Area III mengenai rencana kerja Tim	√		Sudah dilaksanakan
2.	Perumusan materi dan file-file yang terbaru Area III	√		Sudah dilaksanakan

3.	Pengumpulan SK-SK Ketua terbaru	√		Sudah dilaksanakan
4.	Penyusunan eviden-eviden yang terbaru	√		Sudah dilaksanakan
5.	Pembahasan kecocokan eviden dengan topik Area III	√		Sudah dilaksanakan
6.	Monitoring dan evaluasi Area III	√		Sudah dilaksanakan
7.	Tahap penyusunan hasil pengumpulan eviden kekotak berkas atau box odner Area III	√		Sudah dilaksanakan
8.	Laporan ke QMR tentang hasil kerja Area III		√	Dalam proses penyusunan
9	Evaluasi terhadap jadwal rencana kerja	√		Sudah dilaksanakan
10	Laporan dan penyerahan evaluasi jadwal rencana kerja ke QMR		√	Dalam proses penyusunan

4. Penguatan Akuntabilitas

Progres target dan realisasi komponen pengungkit Penguatan Akuntabilitas periode Februari 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Rencana Kegiatan	Pelaksanaan		Keterangan
		Sudah	Belum	
1	Membentuk Tim Pembentuk Tim Kerja Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM Tahun 2025	√		Sudah dilaksanakan
2	Rapat setiap personel mengenai pembagian tugas masing-masing	√		Sudah dilaksanakan
3	Penelusuran SK KPN Terbaru tentang ZI	√		Sudah dilaksanakan
4	Penyusunan eviden LkjIP, Renstra, IKU, Reviu IKU, RKT, PKT, LRA	√		Sudah dilaksanakan
5	Penyusunan evidence penguatan akuntabilitas	√		Sudah dilaksanakan
6	Rapat personel tentang pencocokkan evidence area IV apakah telah sesuai	√		Sudah dilaksanakan
7	Monitoring dan evaluasi tiap evidence yang dikumpulkan	√		Sudah dilaksanakan
8	Laporan ke Koordinator Area IV mengenai evidence yang dikumpulkan	√		Sudah dilaksanakan

5. Penguatan Pengawasan

Progres target dan realisasi komponen pengungkit Penguatan Pengawasan periode Februari 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Rencana Kegiatan	Pelaksanaan		Keterangan
		Sudah	Belum	
1.	Rapat Area V	√		Sudah dilaksanakan
2	Kampanye publik	√		Sudah dilaksanakan
3	Melakukan pemasangan banner-banner dan media informasi	√		Sudah dilaksanakan sebagian
4	Melakukan pengumuman melalui audio tentang larangan gratifikasi setiap Hari	√		Sudah dilaksanakan
5	Melakukan pengumuman anti gratifikasi yang dibacakan oleh Majelis Hakim sebelum sidang	√		Sudah dilaksanakan
6	Melakukan pengawasan bidang oleh Hakim	√		Sudah dilaksanakan
7	Mengumpulkan Laporan Harta Kekayaan	√		Sudah dilaksanakan

	Penyelenggara Negara (LHKPN)			
8	Melakukan monev terhadap pengaduan masyarakat	√		Sudah dilaksanakan
9	Melakukan monev terhadap *Wistle Blowing System*	√		Sudah dilaksanakan
10	Melakukan monev terhadap benturan kepentingan	√		Sudah dilaksanakan

6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Progres target dan realisasi komponen pengungkit Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik periode Februari 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Rencana Kegiatan	Pelaksanaan		Keterangan
		Sudah	Belum	
1	Membentuk Tim Pembentuk Tim Kerja Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM Tahun 2025	√		Sudah dilaksanakan
2	Rapat setiap personel mengenai pembagian tugas masing-masing	√		Sudah dilaksanakan
3	Penelusuran SK KPN Terbaru tentang ZI	√		Sudah dilaksanakan
4	Penyusunan eviden LkjIP, Renstra, IKU, Reviu IKU, RKT, PKT, LRA	√		Sudah dilaksanakan
5	Penyusunan evidence penguatan akuntabilitas	√		Sudah dilaksanakan
6	Rapat personel tentang pencocokkan evidence area IV apakah telah sesuai	√		Sudah dilaksanakan
7	Monitoring dan evaluasi tiap evidence yang dikumpulkan	√		Sudah dilaksanakan
8	Laporan ke Koordinator Area IV mengenai evidence yang dikumpulkan	√		Sudah dilaksanakan

B. EVALUASI

1. Pengadilan Negeri Sarolangun telah melaksanakan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.
2. Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas telah sesuai dengan rencana kerja.

C. REKOMENDASI

1. Penyusunan LKE mencakup pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas bulan Februari 2025 untuk selanjutnya dapat digunakan sebagai acuan untuk laporan monitoring dan evaluasi bulan Februari 2025.
2. Agar pelaksanaan kegiatan rencana kerja di semua area Zona Integritas dapat dipertahankan dan lebih ditingkatkan sesuai dengan rencana kerja masing-masing area.

Demikian Laporan hasil tindak lanjut pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Pengadilan Negeri Sarolangun yang dilaporkan pada bulan Februari 2025. Semoga laporan ini dapat bermanfaat dalam penyelenggaraan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Pengadilan Negeri Sarolangun.

Koordinator Area I
Manajemen Perubahan

Reindra Jasper H Sinaga, S.H

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

PERIODE MARET TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Pelaksanaan Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2024 dilaksanakan sesuai rencana kerja dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah

Permenpan Nomor 10 Tahun 2019 merupakan acuan bagi Pengadilan Negeri Sarolangun dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM untuk mencapai sasaran target penyelesaian dokumen pada 6 (enam) Komponen Pengungkit yangmenjadi faktor penentu pencapaian sasaran hasil pembangunan Zona Integritas tersebut, untuk itu Pengadilan Negeri Sarolangun telah memiliki rencana kerja dalam melaksanakan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM Tahun 2024. Rencana kerjatersebut telah disusun sebagai pedoman kerja bagi tim kerja agar rencana aksi yangdituangkan dalam rencana dapat berjalan sesuai jadwal, target-target dan tahapan-tahapan serta dapat ditindaklanjuti sebagaimana telah ditetapkan dalam monitoringdan evaluasi pelaksanaan Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM.

II. Dasar

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.
2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 194/KMA/SK/X/2014 Tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas.
3. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Tentang Pembentukan

Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi BersihDan Melayani (WBBM) Pada Pengadilan Negeri Sarolangun Kelas II.

III. Tujuan

1. Memastikan rencana aksi berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.
2. Mengkoordinir percepatan implementasi progres pelaksanaan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM sesuai target rencana kerja.
3. Memastikan hambatan atas pelaksanaan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM telah diselesaikan oleh masing-masing Koordinator Komponen Pengungkit.
4. Memastikan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti oleh masing-masing Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Pengadilan Negeri Sarolangun.

IV. Ruang Lingkup

Kegiatan monitoring dan evaluasi meliputi ruang lingkup sebagai berikut:

A. Monitoring

Ruang lingkup kegiatan pemantauan kemajuan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2024 adalah rencana aksi dan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Pengadilan Negeri Sarolangun.

B. Evaluasi

Ruang lingkup kegiatan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Pengadilan Negeri Sarolangun pada 6 Komponen Pengungkit yaitu :

1. Manajemen Perubahan
2. Penataan Tata Laksana
3. Penataan Sistem Manajemen SDM
4. Penguatan Akuntabilitas
5. Penguatan Pengawasan
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

BAB II

MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

A. MONITORING

Perkembangan dan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Sarolangun dapat dirangkum sebagai berikut :

1. Area Manajemen Perubahan

   Progres target dan realisasi komponen pengungkit manajemen perubahan periode Maret 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Rencana Kegiatan	Pelaksanaan		Keterangan
		Sudah	Belum	
1	Membentuk Tim Pembentuk Tim Kerja Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM Tahun 2024.	√		Tim Pembentuk Tim Kerja telah dibuat.
2	Membentuk Tim Kerja Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM Tahun 2024.	√		Tim Kerja Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM telah dibentuk melalui prosedur/mekanisme yang jelas.
3	Menyusun Rencana Kerja Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM Tahun 2024.	√		Rencana Kerja Pembangunan ZI menuju WBK / WBBM Tahun 2024 telah tersusun dalam diterbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor W5-U9/ Kp.04.4/7/2024.
4	Melakukan Sosialisasi tentang Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM kepada seluruh pegawaiPN Sarolangun.	√		Sosialisasi tentang Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM kepada seluruh pegawai PN Sarolangun sudah dilaksanakan.

5	Menyelenggarakan rapat Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Area 1 Manajemen Perubahan Bulan Maret 2025	√		Rapat Pembangunan ZI pada Area 1 sudah dilaksanakan.
6	Laporan Rencana Kerja Area 1 Manajemen Perubahan Bulan September 2024	√		Laporan Rencana Kerja Area 1 Manajemen Perubahan telah Dikerjakan
7	Laporan Rencana Kerja Area 2 Penataan Tata Laksana Bulan Maret 2025	√		Area 2 Penataan Tata Laksana telah menyerahkan laporan rencana kerja bulan Maret 2025
8	Laporan Rencana Kerja Area 3 Penataan Sistem Manajemen SDM Bulan Maret 2025	√		Area 3 Penataan Sistem Manajemen SDM telah menyerahkan laporan rencana kerja bulan Maret 2025
9	Laporan Rencana Kerja Area 4 Penguatan Akuntabilitas Bulan Maret 2025	√		Area 4 Penguatan Akuntabilitas telah menyerahkan laporan rencana kerja bulan Maret 2025
10	Laporan Rencana Kerja Area 5 Penguatan Pengawasan Bulan Maret 2025	√		Area 5 Penguatan Pengawasan telah menyerahkan laporan rencana kerja bulan Maret 2025
11	Laporan Rencana Kerja Area 6 Peningkatan	√		Area 6 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik telah

	Kualitas Pelayanan Publik Bulan Maret 2025			menyerahkan laporan rencana kerja bulan Maret 2025
12	Membangun budaya kerja dan pola pikir di PN Sarolangun melalui:			
	- Penetapan Role Model	√		Role Model telah Ditetapkan
	- Penetapan Agen Perubahan	√		Agen Perubahan telah ditetapkan.
	- Penunjukan Tim Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	√		Tim Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) telah dibentuk dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun
	- Sosialisasi Perma Nomor 7, 8 dan 9 Tahun 2016 serta Maklumat Ketua Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 01/Maklumat/ KMA/IX/2017	√		Sudah rutin dilaksanakansetiap rapat bulanan.
	- Sosialisasi 5 R dan 3S	√		Sudah rutin dilaksanakan setiap rapat bulanan.
	- Apel Pagi dan Sore	√		Sudah rutin dilaksanakan setiap Senin pagi dilanjutkan dengan pembinaan oleh Ketua Pengadilan, dan sebelum apel Jum'at sore dilanjutkan dengan pembinaan oleh Ketua Pengadilan.
	- Rapat Berjenjang dan Rapat Bulanan.	√		Sudah dilaksanakan setiap bulan

	- Penandatanganan Pakta Integritas dan Komitmen Bersama.	√		Penandatangan Pakta Integritas dan Komitmen Bersama sudah dilaksanakan oleh seluruh Pegawai PN Sarolangun
14	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Area 1 Manajemen Perubahan	√		Monev dilaporkan setiap bulan sejak Maret 2025.
15	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Area 2 Penataan Tata Laksana	√		Monev dilaporkan setiap bulan sejak Maret 2025.
16	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Area 3 Penataan Sistem Manajemen SDM	√		Monev dilaporkan setiap bulan sejak Maret 2025.
17	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Area 4 Penguatan Akuntabilitas	√		Monev dilaporkan setiap bulan sejak Maret 2025.
18	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Area 5 Penguatan Pengawasan	√		Monev dilaporkan setiap bulan sejak Maret 2025.
19	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Area 6 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	√		Monev dilaporkan setiap bulan sejak Maret 2025.

2. Penataan Tata Laksana

Progres target dan realisasi komponen pengungkit Penataan Tata Laksana periode Maret 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Rencana Kegiatan	Pelaksanaan		Keterangan
		Sudah	Belum	
1.	Rapat kordinasi area	√		Sudah dilaksanakan untuk membahas rencana kerja
2.	Peneribitan SK terkait SOP	√		Sudah memperoleh salinan SK dari kepegawaian
3.	Mengupdate dokumentasi aplikasi layanan	√		Sudah mendokumentasikan aplikasi-aplikasi terbaru
4.	Melakukan pengembangan aplikasi layanan publik	√		Telah mengembangkan aplikasi layanan publik.
5	Monev aplikasi layanan publik		√	Rencana akan dilaksanakan bulan depan
6	Monev keterbukaan informasi publik		√	Rencana akan dilaksanakan bulan depan
7	Memaksimalkan web site dan media sosial untuk keterbukaan informasi Publik	√		Sudah memuat berbagai informasi dan berita kedalam website dan media sosial

3. Penataan Sistem Manajemen SDM

Progres target dan realisasi komponen pengungkit Penataan Manajemen SDM periode Maret 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Rencana Kegiatan	Pelaksanaan		Keterangan
		Sudah	Belum	
1.	Rapat tim Area III mengenai rencana kerja Tim	√		Sudah dilaksanakan
2.	Perumusan materi dan file-file yang terbaru Area III	√		Sudah dilaksanakan

3.	Pengumpulan SK-SK Ketua terbaru	√		Sudah dilaksanakan
4.	Penyusunan eviden-eviden yang terbaru	√		Sudah dilaksanakan
5.	Pembahasan kecocokan eviden dengan topik Area III	√		Sudah dilaksanakan
6.	Monitoring dan evaluasi Area III	√		Sudah dilaksanakan
7.	Tahap penyusunan hasil pengumpulan eviden kekotak berkas atau box odner Area III	√		Sudah dilaksanakan
8.	Laporan ke QMR tentang hasil kerja Area III		√	Dalam proses penyusunan
9	Evaluasi terhadap jadwal rencana kerja	√		Sudah dilaksanakan
10	Laporan dan penyerahan evaluasi jadwal rencana kerja ke QMR		√	Dalam proses penyusunan

4. Penguatan Akuntabilitas

Progres target dan realisasi komponen pengungkit Penguatan Akuntabilitas periode Maret 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Rencana Kegiatan	Pelaksanaan		Keterangan
		Sudah	Belum	
1	Membentuk Tim Pembentuk Tim Kerja Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM Tahun 2025	√		Sudah dilaksanakan
2	Rapat setiap personel mengenai pembagian tugas masing-masing	√		Sudah dilaksanakan
3	Penelusuran SK KPN Terbaru tentang ZI	√		Sudah dilaksanakan
4	Penyusunan eviden LkjIP, Renstra, IKU, Reviu IKU, RKT, PKT, LRA	√		Sudah dilaksanakan
5	Penyusunan evidence penguatan akuntabilitas	√		Sudah dilaksanakan
6	Rapat personel tentang pencocokkan evidence area IV apakah telah sesuai	√		Sudah dilaksanakan
7	Monitoring dan evaluasi tiap evidence yang dikumpulkan	√		Sudah dilaksanakan
8	Laporan ke Koordinator Area IV mengenai evidence yang dikumpulkan	√		Sudah dilaksanakan

5. Penguatan Pengawasan

Progres target dan realisasi komponen pengungkit Penguatan Pengawasan periode Maret 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Rencana Kegiatan	Pelaksanaan		Keterangan
		Sudah	Belum	
1.	Rapat Area V	√		Sudah dilaksanakan
2	Kampanye publik	√		Sudah dilaksanakan
3	Melakukan pemasangan banner-banner dan media informasi	√		Sudah dilaksanakan sebagian
4	Melakukan pengumuman melalui audio tentang larangan gratifikasi setiap Hari	√		Sudah dilaksanakan
5	Melakukan pengumuman anti gratifikasi yang dibacakan oleh Majelis Hakim sebelum sidang	√		Sudah dilaksanakan
6	Melakukan pengawasan bidang oleh Hakim	√		Sudah dilaksanakan
7	Mengumpulkan Laporan Harta Kekayaan	√		Sudah dilaksanakan

	Penyelenggara Negara (LHKPN)			
8	Melakukan monev terhadap pengaduan masyarakat	√		Sudah dilaksanakan
9	Melakukan monev terhadap *Wistle Blowing System*	√		Sudah dilaksanakan
10	Melakukan monev terhadap benturan kepentingan	√		Sudah dilaksanakan

6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Progres target dan realisasi komponen pengungkit Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik periode Maret 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Rencana Kegiatan	Pelaksanaan		Keterangan
		Sudah	Belum	
1	Membentuk Tim Pembentuk Tim Kerja Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM Tahun 2025	√		Sudah dilaksanakan
2	Rapat setiap personel mengenai pembagian tugas masing-masing	√		Sudah dilaksanakan
3	Penelusuran SK KPN Terbaru tentang ZI	√		Sudah dilaksanakan
4	Penyusunan eviden LkjIP, Renstra, IKU, Reviu IKU, RKT, PKT, LRA	√		Sudah dilaksanakan
5	Penyusunan evidence penguatan akuntabilitas	√		Sudah dilaksanakan
6	Rapat personel tentang pencocokkan evidence area IV apakah telah sesuai	√		Sudah dilaksanakan
7	Monitoring dan evaluasi tiap evidence yang dikumpulkan	√		Sudah dilaksanakan
8	Laporan ke Koordinator Area IV mengenai evidence yang dikumpulkan	√		Sudah dilaksanakan

B. EVALUASI

1. Pengadilan Negeri Sarolangun telah melaksanakan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.
2. Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas telah sesuai dengan rencana kerja.

C. REKOMENDASI

1. Penyusunan LKE mencakup pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas bulan Maret 2025 untuk selanjutnya dapat digunakan sebagai acuan untuk laporan monitoring dan evaluasi bulan Maret 2025.
2. Agar pelaksanaan kegiatan rencana kerja di semua area Zona Integritas dapat dipertahankan dan lebih ditingkatkan sesuai dengan rencana kerja masing-masing area.

Demikian Laporan hasil tindak lanjut pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Pengadilan Negeri Sarolangun yang dilaporkan pada bulan Maret 2025. Semoga laporan ini dapat bermanfaat dalam penyelenggaraan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM diPengadilan Negeri Sarolangun.

Koordinator Area I
Manajemen Perubahan

Reindra Jasper H Sinaga, S.H